
Sekolah Etnis Tionghoa Di Jakarta Pada Masa Pemerintahan Presiden Soeharto (1966-1998)

Dwi Sudibyo¹, Sumaryoto², Sumaryati³

^{1,2,3}Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of the study was to find out the social, economic and educational conditions of the Chinese community in the early days of President Soeharto's administration; to find out the policies of President Soeharto's administration towards the Chinese ethnic group in Jakarta in the field of education; to find out the development of Chinese ethnic schools in Jakarta during the late days of President Soeharto's administration in Jakarta; Based on the results of the study: 1) That after the 1950s, the government of the Republic of Indonesia tried to build Indonesia's economic life. One way is to develop indigenous entrepreneurs; 2) That Chinese politics during the New Order era was a "Broker" type of politics, the interests of the Chinese people were represented by several Chinese figures who had relations with the authorities; 3) That after the New Order government collapsed, education for Chinese children in Indonesia was freer. During the period of approximately 32 years of the New Order era, there were no books in Mandarin. However, the situation changed after the New Order government led by President Soeharto collapsed on May 21, 1998.

Key Words: Chinese Ethnic School; President Soeharto's Era

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk Mengetahui keadaan sosial, ekonomi dan pendidikan masyarakat Tionghoa pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto; Mengetahui kebijakan pemerintahan Presiden Soeharto terhadap kelompok etnis Tionghoa di Jakarta dalam bidang pendidikan; Mengetahui perkembangan sekolah-sekolah etnis Tionghoa di Jakarta pada masa akhir pemerintahan Presiden Soeharto di Jakarta; Berdasarkan Hasil penelitian: 1) Bahwa Setelah tahun 1950an, pemerintah Republik Indonesia berusaha membangun kehidupan ekonomi Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan pengusaha Pribumi; 2) Bahwa politik Tionghoa pada zaman Orde Baru merupakan politik tipe "Broker" kepentingan orang Tionghoa diwakili oleh beberapa tokoh Tionghoa yang ada hubungan dengan penguasa; 3) Bahwa setelah pemerintahan orde baru runtuh, maka pendidikan untuk anak-anak Tionghoa di Indonesia lebih bebas. Selama kurun waktu kurang lebih 32 tahun dari masa Orde Baru tidak ada buku-buku dalam bahasa Mandarin. Akan tetapi keadaan berubah setelah pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto runtuh pada tanggal 21 Mei 1998.

Kata Kunci: Sekolah Etnis Tionghoa; Masa Pemerintahan Presiden Soeharto

Penulis Korespondensi: (1) Dwi Sudibyo, (2) Universitas Indraprasta PGRI, (3) Jl. Nangka Raya No.58C. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa - Jakarta Selatan, Indonesia, (4) Email: dbyo46@gmail.com

Copyright © 2025. The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada tahun 1965 terjadi peristiwa politik yang cukup penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yakni meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan nama G30S. Peristiwa politik yang terpusat di wilayah Jakarta (pusat pemerintahan) ini, ditenggarai melibatkan kelompok etnis Tionghoa yang umumnya tergabung dalam organisasi Baperki sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia. Gerakan 30 September 1965 tersebut dinilai oleh pemerintahan Presiden Soeharto sebagai upaya untuk mengambil alih kekuasaan di Indonesia, yang disuport oleh pemerintahan Beijing di Cina. Peristiwa tersebut kemudian direspon dengan pelarangan dan pemutusan hubungan politik antara pemerintahan Indonesia dengan Tiongkok (Coppel, 1993: 40).

Pasca naiknya Presiden Soeharto menggantikan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan penutupan sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Tionghoa pada 6 Juli 1966. Setelah itu pada tahun 1967 pemerintahan Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat etnis Tionghoa di Indonesia. Kebijakan ini dikenal dengan nama Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967, yang mengatur mengenai batasan-batasan bagi kehidupan sosial-budaya etnis Tionghoa di muka umum. Dua kebijakan dasar tersebut menjadi kunci dalam perkembangan etnis Tionghoa di Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan, karena pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto terdapat 300.000 orang anak-anak Tionghoa yang tercatat sedang menempuh pendidikan yang tersebar di wilayah Indonesia (Setiono, 2005: 18).

Sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan seperti Baperki dan THHK juga tidak luput dari kebijakan sensor dan penutupan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Khususnya sekolah dan lembaga pendidikan lain (perguruan tinggi) yang sebelumnya berada di bawah naungan organisasi Baperki, seluruhnya diambil alih secara paksa oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Sebagai contoh adalah sekolah Ureca yang diambil alih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto dan kemudian diganti dengan mendirikan Universitas Trisakti. Sementara itu sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan organisasi THHK dibatasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal jumlah dan komposisi murid, kurikulum serta bahasa pengantar (wajib menggunakan bahasa Indonesia) dalam proses belajar mengajarnya (Suryadinata, 1999: 27).

Pada perkembangannya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Soeharto terhadap dunia pendidikan bagi anak-anak Tionghoa di Jakarta, membuat anak-anak Tionghoa di Jakarta sulit untuk mendapatkan akses kedalam dunia pendidikan di Jakarta. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kota Jakarta, umumnya lebih banyak untuk menampung anak-anak bumiputera, sehingga pada tahun 1968 terdapat banyak fenomena anak-anak Tionghoa di Jakarta yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Merespon situasi tersebut organisasi THHK kemudian mengusulkan agar pemerintah Indonesia memberikan izin untuk dibukanya sekolah-sekolah swasta bagi anak-anak Tionghoa dibawah kontrol Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Memasuki akhir tahun 1968 usul tersebut diterima oleh pemerintah dan melahirkan Peraturan Presiden No. B12 Tahun 1968 mengenai sekolah-sekolah swasta yang didirikan atas dasar sponsor masyarakat Tionghoa (Setiono, 2005: 19-21). Kebijakan dalam bentuk PP No. B12 tahun 1968 tersebut kemudian dikenal dengan nama proyek khusus dari pendirian sekolah-sekolah bagi anak-anak etnis Tionghoa. Di kota Jakarta sekolah khusus tersebut dikenal pula dengan nama *Datong Zhongxiao Xuexiao* (sekolah Bhineka Tunggal Ika) dan sekolah nasional khusus Jaya Sakti. Pada perkembangannya dipertengahan tahun 1969 dua sekolah tersebut juga didirikan di wilayah Semarang dan Surabaya. Kedua-duanya didirikan oleh orang-orang Tionghoa Totok yang pro-Taiwan di Jakarta. Sekolah ini berada di bawah pengawasan langsung dari Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan. Anak-anak warga negara Indonesia maupun warga negara asing boleh bersekolah disini. Kurikulumnya sama seperti kurikulum Indonesia, hanya saja pada kurikulum tersebut boleh ditambahkan bahasa Mandarin (Tan, 1979: 58).

Sekolah-sekolah Sekolah Nasional Proyek Khusus ini mewajibkan agar : 1. Murid-muridnya merupakan gabungan dari anak-anak warga negara asing, WNI keturunan asing dan WNI asli, 2. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia, 3. Bahasa asing (Tionghoa) hanya berstatus sebagai salah satu mata pelajaran. Pemerintah Orde Baru ingin menjadikan sekolah sebagai suatu wadah pembauran. Wadah itu sendiri dapat dianggap sebagai wadah pembauran dengan harapan agar kelompok anak-anak WNI keturunan asing dapat melebur ke dalam kelompok yang lebih dominan, yaitu kelompok anak-anak keturunan asli. Ada perbedaan kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap kelompok-kelompok etnik WNI asli dibanding dengan kebijakan terhadap WNI keturunan asing. Untuk WNI keturunan asing, pemerintah menekankan agar mereka membaaur secara total ke dalam masyarakat nasional. Sekolah-sekolah pembauran dipandang oleh pemerintah sebagai wadah pembauran antara kelompok WNI asli dengan kelompok WNI keturunan asing, maka diharapkan generasi muda WNI keturunan asing dapat meleburkan diri ke dalam masyarakat dan budayanya ke dalam masyarakat nasional melalui wadah pendidikan itu (Yudohusodo, 1985: 71).

Pemerintah Orde Baru pada saat itu mengeluarkan lebih dari seratus peraturan untuk membatasi ruang gerak warga keturunan Tionghoa di dalam bidang politik, ekonomi, agama, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Aksara, bahasa, kebudayaan, adat istiadat, koran dan semua terbitan Tionghoa dinyatakan terlarang. Pemerintah Orde Baru telah berhasil mengindonesiakan orang-orang Tionghoa, sebagaimana terbukti dari tingkat kemampuan membaca dan menulis di antara generasi Tionghoa yang lebih muda. Karena bahasa Tionghoa dipelajari dan didapatkan secara terbatas oleh sebagian kecil di antara mereka. Para orang tua dari anak-anak Tionghoa yang bersekolah di sekolah-sekolah negeri dan sekolah proyek khusus tersebut, memiliki rasa khawatir mengenai identitas dan nilai-nilai budaya yang berangsur-angsur menghilang sebagai konsekuensi asimilasi total dalam sekolah-sekolah tersebut (Efendi, 2008: 33).

Sebagian dari sekolah proyek khusus tersebut kemudian berinisiatif untuk memberikan pembelajaran bahasa Tionghoa dalam proses belajar mengajar, akan tetapi kemudian direspon oleh pemerintah Indonesia dengan menutup sekolah tersebut dan membatalkan kebijakan proyek sekolah khusus tersebut. Sekolah, lahan, dan murid-murid dari proyek sekolah khusus tersebut kemudian berada dibawah langsung Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Sejak tahun 1970 sekolah-sekolah proyek khusus di Jakarta yang berjumlah 5 sekolah, berada dibawah naungan langsung Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Komposisi murid yang sebelumnya berjumlah 60% anak Tionghoa dan 40% anak bumiputera kemudian berubah menjadi masing-masing 50% (Liem, 2000: 51-53).

Pada perkembangannya di tahun 1980 menuju tahun 1990-an upaya pengekangan dan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pendidikan disekolah-sekolah swasta Tionghoa tersebut mengalami penurunan. Penurunan terlihat dari jumlah siswa yang berasal dari anak-anak bumiputera, hal ini tidak terlepas dari citra negatif yang dibentuk oleh pemerintah terhadap etnis Tionghoa dan membuat para orang tua dari anak-anak bumiputera enggan untuk menyekolahkan anak-anak mereka bersama atau dilembaga pendidikan yang diasuh oleh yayasan milik etnis Tionghoa di Jakarta. Secara perlahan-lahan sekolah-sekolah swasta yang dibentuk oleh Yayasan etnis Tionghoa di Jakarta tutup, hal ini dikarenakan persyaratan mengenai komposisi murid yang tidak dapat dipenuhi oleh sekolah-sekolah swasta Tionghoa tersebut (Liem, 2000: 60).

Memasuki akhir tahun 1980-an anak-anak Tionghoa semakin kesulitan untuk mendapatkan akses dalam dunia pendidikan, karena sekolah-sekolah swasta milik etnis Tionghoa semakin sulit

untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara. Sehingga pada akhir tahun 1980-an sekolah-sekolah yang bernafaskan religi (Kristen) menjadi saluran pendidikan alternatif bagi anak-anak Tionghoa di Jakarta. Sebagai contoh adalah sekolah yang berada dibawah naungan Gereja Bethel di Indonesia, sekolah dibawah naungan Yayasan Kristen Penabur, sekolah Yayasan Advent dan lain sebagainya. Sekolah berbasis religi kemudian yang membuat anak-anak yang berasal dari etnis Tionghoa di Jakarta menjadi harapan terakhir untuk mendapatkan pendidikan, karena untuk dapat masuk kesekolah-sekolah negeri mereka terkendala oleh jumlah siswa yang diberikan/ diterima (Mahfud, 2013: 27).

Setelah pemerintahan orde baru runtuh, maka pendidikan untuk anak-anak Tionghoa di Indonesia lebih bebas. Banyak SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi yang bagus, bahkan bisa sangat mahal dibuka untuk semua anak baik dari kelompok WNI asli ataupun dari WNI keturunan asing. Selama kurun waktu kurang lebih 32 tahun dari masa Orde Baru tidak ada buku-buku dalam bahasa Mandarin. Akan tetapi keadaan berubah setelah pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto runtuh pada tanggal 21 Mei 1998. Setelah Presiden Soeharto lengser, penggantinya adalah Presiden B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999. Hasilnya memang terjadi perubahan dalam hal hak warga keturunan Tionghoa. Masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie tidak berlangsung lama (Chang-Yau, 2004: 39). Hanya berlangsung selama satu tahun. Setelah itu, Presiden B.J. Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 1999. Gus Dur pada tahun 2000 mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Orang-orang Tionghoa diperbolehkan menjalankan segala bentuk ekspresi kebudayaan Tionghoa, termasuk mempelajari bahasa Mandarin beserta akasarnya. (Prasetyo 2010: 170).

Penelaahan mengenai sejarah sekolah-sekolah etnis Tionghoa pada masa pemerintahan Presiden Soeharto merupakan satu pembahasan yang cukup menarik, sehingga penulis memiliki ketertarikan lebih mendalam untuk memahami sejarah sekolah-sekolah etnis Tionghoa pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Bagaimana upaya penguasa dalam konteks politik mencoba untuk meredam dan meminimalisir munculnya satu identitas dari satu kelompok masyarakat tertentu di Indonesia. Sejatinya etnis Tionghoa bukanlah kelompok etnis yang baru datang atau muncul di Indonesia, karena keberadaan mereka telah ada sejak masa-masa Kerajaan Tradisional di Nusantara (jauh sebelum berdirinya Republik Indonesia).

Pokok atau fokus permasalahan yang hendak dipahami secara lebih mendalam dalam studi sejarah sekolah-sekolah etnis Tionghoa di Jakarta pada masa Presiden Soeharto ini adalah kemampuan adaptasi dari kelompok etnis Tionghoa dalam konteks politik. Periode pemerintahan Presiden Soeharto yang penuh dengan pembatasan-pembatasan (sosial, politik, ekonomi dan budaya) mampu dilalui oleh etnis Tionghoa dan memodifikasi sekolah-sekolah yang berbasis religi (Kristen) sebagai langkah untuk dapat memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Tahun 1966 hingga tahun 1998 menjadi periode pembahasan penelitian, karena tahun 1966 menjadi awal berdirinya pemerintahan Presiden Soeharto dan tahun 1998 menjadi akhir dari runtuhnya pemerintahan Presiden Soeharto.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut Abdurahman (2007:53) dalam bukunya metodologi penelitian sejarah, metode sejarah adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikannya jalan pemecahannya dari perspektif historis. Pendapat lain mengenai metode penelitian sejarah diungkapkan oleh Gottschalk, penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.

(Ismaun, 2005:35) menjelaskan, Rekaman dan peninggalan pada masa lampau ini bisa disebut dengan sumber sejarah, sumber sejarah ialah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau.

Prosedur

Prosedur yang digunakan adalah studi kepustakaan, Penelitian kepustakaan adalah pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan di pustaka, dengan dokumen, arsip, dan jenis dokumen lainnya untuk digunakan sebagai sumber penelitian, Prastowo(2012). Bentuk penelitian deksriptif-naratif yang tahapannya berawal dari heuristik yaitu mengumpulkan sumber-sumber berupa dokumen, arsip, buku dan koran, lalu kritik sumber secara internal dan eksternal dilanjutkan dengan interpretasi data dan merangkai hubungan antara kebijakan-kebijakan yang diteliti, dan terakhir proses penulisan menjadi sebuah karya tulis yang utuh.

HASIL

Sekolah etnis Tionghoa di Jakarta pada masa pemerintahan Presiden Soeharto mengalami berbagai implikasi yang signifikan. Kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru berdampak pada perubahan dalam sistem pendidikan dan kurikulum sekolah-sekolah ini. Salah satu implikasi utama adalah penghapusan penggunaan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar di sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi identitas etnis Tionghoa yang dianggap dapat menghambat proses asimilasi. Akibatnya, generasi muda Tionghoa kehilangan kemampuan berbahasa Mandarin dan dengan budaya leluhur mereka menjadi terputus. Selain itu, kurikulum sekolah etnis Tionghoa juga mengalami perubahan yang signifikan. Materi pelajaran yang berkaitan dengan budaya dan sejarah Tionghoa dihapus atau dikurangi porsinya. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman siswa tentang akar budaya mereka sendiri.

Implikasi lainnya adalah pembatasan penerimaan siswa dari etnis Tionghoa di sekolah-sekolah negeri. Kebijakan ini menyebabkan banyak siswa Tionghoa tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun demikian, ada juga beberapa implikasi positif dari kebijakan ini. Misalnya, siswa etnis Tionghoa menjadi lebih terintegrasi dengan masyarakat Indonesia secara luas. Mereka juga memiliki kesempatan untuk mempelajari budaya dan bahasa Indonesia dengan lebih baik. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, komunitas minoritas di Indonesia terus berupaya untuk memberdayakan diri mereka. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

1. Revitalisasi Budaya: Komunitas etnis Tionghoa terus berupaya untuk merevitalisasi budaya mereka melalui berbagai kegiatan seperti festival budaya, kursus bahasa, dan sanggar seni. Upaya ini bertujuan untuk mempertahankan identitas budaya mereka dan mencegah terjadinya asimilasi paksa.
2. Pendidikan Alternatif: Beberapa komunitas etnis Tionghoa mendirikan sekolah-sekolah alternatif atau pusat-pusat kegiatan belajar yang memberikan pendidikan tentang bahasa, budaya, dan sejarah Tionghoa. Upaya ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga etnis Tionghoa.
3. Advokasi dan Perjuangan Hak: Komunitas minoritas juga melakukan advokasi dan memperjuangkan hak-hak mereka di berbagai bidang, termasuk pendidikan, politik, dan ekonomi. Upaya ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara. Advokasi dan Perjuangan Hak: Komunitas minoritas juga melakukan advokasi dan memperjuangkan hak-hak mereka di berbagai bidang, termasuk pendidikan, politik, dan ekonomi. Upaya ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara.

DISKUSI

Pada masa Soeharto, pemerintah menerapkan kebijakan asimilasi yang bertujuan memperkuat persatuan nasional dan mengurangi segregasi etnis. Namun, kebijakan ini sering kali mengorbankan keberagaman budaya, khususnya budaya Tionghoa. Penghapusan penggunaan bahasa Mandarin dalam pendidikan menggambarkan upaya pemerintah untuk mengurangi identitas etnis dan menciptakan masyarakat yang homogen. Sekolah-sekolah etnis Tionghoa mengalami perubahan kurikulum yang signifikan, dengan materi-materi terkait budaya dan sejarah Tionghoa yang dihapus atau dikurangi. Hal ini tidak hanya mengurangi pemahaman siswa tentang warisan budaya mereka, tetapi juga menurunkan rasa percaya diri dan identitas mereka sebagai bagian dari komunitas Tionghoa. Tindakan ini berimplikasi pada generasi muda yang bertumbuh tanpa pengertian yang kuat tentang asal usul dan nilai-nilai budaya mereka.

Integrasi Sosial dan Budaya, Sementara kebijakan asimilasi memiliki dampak negatif bagi identitas etnis Tionghoa, ada juga sisi positif yang terlihat dari peningkatan integrasi sosial. Siswa etnis Tionghoa dapat berinteraksi dengan rekan-rekan dari berbagai suku dan budaya Indonesia lainnya. Meskipun demikian, integrasi ini membawa tantangannya sendiri, di mana siswa Tionghoa mungkin menghadapi stereotip atau prasangka dari masyarakat yang lebih luas.

Kesenjangan Pendidikan, Kebijakan pembatasan penerimaan siswa Tionghoa di sekolah-sekolah negeri memperparah kesenjangan pendidikan. Banyak siswa Tionghoa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, mengakibatkan kurangnya akses ke peluang kerja yang lebih baik di masa depan. Hal ini menciptakan siklus ketidakadilan yang berdampak pada perkembangan ekonomi dan sosial komunitas Tionghoa.

Respon Komunitas Tionghoa, Di tengah tantangan yang dihadapi, komunitas Tionghoa menunjukkan ketahanan dan upaya untuk memberdayakan diri. Mereka melibatkan diri dalam kegiatan budaya dan pendidikan alternatif untuk melestarikan identitas mereka. Selain itu, beberapa kelompok komunitas berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat lokal untuk menciptakan pengertian dan mengurangi stereotip negatif.

Refleksi Kebijakan dan Masa Depan, Diskusi ini juga membuka peluang untuk merefleksikan kembali kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan etnisitas dan pendidikan. Penting untuk menemukan keseimbangan antara asimilasi dan pelestarian budaya, agar setiap komunitas etnis di Indonesia dapat merasa diakui dan memiliki tempat dalam kerangka nasional, sambil tetap menjaga keberagaman yang menjadi kekuatan negara.

SIMPULAN

1. Bahwa kedekatan presiden Soekarno yang anti-kolonialis dengan Partai Komunis yang berideologi kekiri dan berorientasi ke Uni Soviet dan RRC yang secara tidak langsung memperluas ruang gerak PKI (Partai Komunis Indonesia) yang lebih dekat ke Cina dalam berbagai sektor pemerintahan dalam negeri. Namun hal itu menjadi bumerang bagi orang Tionghoa di Indonesia, karena pada peristiwa kudeta pemerintahan Soekarno yang populer dengan peristiwa G30S (Gerakan 30 September) terjadi pembantaian massal terhadap para anggota PKI. Peristiwa ini menjadikan orang-orang Tionghoa di Indonesia sebagai kambing hitam atas peristiwa tersebut karena kedekatan PKI dengan RRC dan menganggap semua orang Tionghoa adalah komunis. Peristiwa tersebut menimbulkan perpecahan antara orang Tionghoa dengan Pribumi dan menanamkan kebencian terhadap orang Tionghoa yang dipandang sebagai komunis hingga menyebabkan pembantaian besar-besaran terhadap orang Tionghoa (Wibowo dan Thung, 2010: 67). Bahwa pada zaman “Demokrasi Terpimpin” Presiden Soekarno (1959-1965), banyak perusahaan besar Belanda yang di nasionalisasi dalam rangka perjuangan merebut kembali Irian Barat. Perusahaan-perusahaan ini dijadikan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada masa ini pengusaha Tionghoa terlihat kurang mendapat kesempatan untuk bergerak dalam usaha skala besar, tapi usaha perekonomian skala menengah dan kecil masih tetap dalam dominasi tangan mereka.

2. Bahwa pada tanggal 6 Juli 1966, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan yang menutup semua sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa. Tahun berikutnya muncul Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 mengenai Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Hal ini berdampak terhadap dilarangnya penggunaan aksara Tionghoa dalam bentuk penerbitan apapun, yang berlanjut dengan tindakan pemusnahan secara besar-besaran buku-buku berbahasa Mandarin. Puncaknya adalah penutupan lembaga-lembaga pendidikan Tionghoa (Isnaini, 2013: 8). Politik Tionghoa pada zaman Orde Baru merupakan politik tipe “Broker” kepentingan orang Tionghoa diwakili oleh beberapa tokoh Tionghoa yang ada hubungan dengan penguasa, beberapa lembaga yang berhubungan dengan pemerintah atau orang pemerintah seperti Bakom-PKB (Badan komunikasi penghayatan kesatuan bangsa) dan CSIS (Centre for Strategic and International Studies) sering digunakan untuk menyalurkan permintaan Etnis-Tionghoa. Sistem Cukong juga berupa satu saluran untuk memberikan masukan kepada kebijakan pemerintah. Pemerintah Soeharto tidak menginginkan etnis Tionghoa duduk sebagai tokoh politik. Pemerintah Orde Baru ingin menjadikan sekolah sebagai suatu wadah pembauran. Wadah itu sendiri dapat dianggap sebagai wadah pembauran dengan harapan agar kelompok anak-anak WNI keturunan asing dapat melebur ke dalam kelompok yang lebih dominan, yaitu kelompok anak-anak keturunan asli.
3. Bahwa setelah Presiden Soeharto lengser, penggantinya adalah Presiden B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999. Hasilnya memang terjadi perubahan dalam hal hak warga keturunan Tionghoa. Masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie tidak berlangsung lama. Hanya berlangsung selama satu tahun. Setelah itu, Presiden B.J. Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 1999. Gus Dur pada tahun 2000 mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Orang-orang Tionghoa diperbolehkan menjalankan segala bentuk ekspresi kebudayaan Tionghoa, termasuk mempelajari bahasa Mandarin beserta akasarnya. (Prasetyo 2010: 170). Setelah pemerintahan orde baru runtuh, maka pendidikan untuk anak-anak Tionghoa di Indonesia lebih bebas. Banyak SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi yang bagus, bahkan bisa sangat mahal dibuka untuk semua anak baik dari kelompok WNI asli ataupun dari WNI keturunan asing. Selama kurun waktu kurang lebih 32 tahun dari masa Orde Baru tidak ada buku-buku dalam bahasa Mandarin. Akan tetapi keadaan berubah setelah pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto runtuh pada tanggal 21 Mei 1998.

REFERENSI

- Barth, Frederick. 1988. *Kelompok Etnis dan Batasannya*. Jakarta: UI Press
- Blackburn, Susan. 2011. *Jakarta: Sejarah 400 tahun*, Jakarta: Masup Jakarta.
- Chang-Yau Hoon. 2004. *Identitas Tionghoa Pasca Soeharto: Budaya, Politik dan media*. Jakarta: Yayasan Nabil dan LP3ES.
- Colombijn, Freek dkk. 2005. *Kota Lama, Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan, Cet. I*; Yogyakarta: Ombak.
- Coppel, Charles A. 1993. *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta: Sinar Harapan
- Efendi, Wahyu. 2008. *Tionghoa dalam cengkraman SBKRI*. Jakarta: Tranmedia Pustaka

- Fatah, Saefulah. 2000. *Penghianatan Demokrasi Ala Orde Baru: Masalah dan Masa Demokrasi Terpimpin Konstitusional*. Bandung: Rosdakarya
- Haryono, Timbul. 2006. Antropologi Entis Tionghoa Makassar. Makassar: Mataprees.
- Husin, Huddy dan Kosasih, Ahmad. 2023. Perniagaan Beras Etnis Tionghoa di Makassar 1906-1942, dalam jurnal Alur Sejarah Vol. 5, No.2. Februari 2023, 76-83.
- Isnaini, Noor. 2013. *Perkembangan Pendidikan Anak-Anak Tionghoa Pada Abad 19 Hingga Akhir Orde Baru di Indonesia*. Tanpa Penerbit.
- Kaco, Suardi. 2023. Masyarakat Tionghoa di Makassar Dalam Pusaran Konflik Etnis 1965-1997, dalam Jurnal Sosioreligius, Vol. 8, Nomor. 1 Juni 2023, 61-71.
- Kaboel, Assa R. dan Nita Madona Sulanti. 2010. "Bahasa Mandarin di Mana-Mana: Studi Kasus di Wilayah DKI Jakarta". Setelah Air Mata Kering (Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998), Kompas 2010.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- _____. 2014. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah pergerakan Nasional: Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Yogyakarta: Ombak.
- Kawu, Shadiq dkk. 2011. Spirit Khonghucu: Modal Sosial dalam Merenda Kebangsaan, Cet. I; Jakarta Selatan: Orbit Publishing.
- Koentjaraningrat. 2007. Pengantar Antropologi. Jakarta: UI Prees.
- Liem Yusiun. 2000. *Prasangka Terhadap Etnis Cina: Sebuah Intisari evaluasi 32 Tahun di Bawah Rezim Soeharto*. Jakarta: Djambatan.
- Lohanda, Mona. 1994. *The Kapitan Cina of Batavia : A History of Chinese Establishment in Colonial Society*, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Mahfud, Choirul. 2013. Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhaimin, A. Yahya . 1980. *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. Jakarta: LP3ES.
- Nurhayati dan Aksa. 2020. Tionghoa Muslim di Makassar: Studi Atas Pembauran dalam Bidang Budaya dan Ekonomi Masa Orde Baru, dalam Jurnal Yupa: Historical Studies Journal, Vol. 4 No.2, 2020, 93-102.
- Pelly, Usman. 2003. "Murid Pri dan Nonpri pada Sekolah Pembauran: Kebijakan Asimilasi Orde Baru di Bidang Pendidikan dan Dampaknya terhadap Masyarakat Multikultural". Jurnal Antropologi Indonesia (Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology), No. 71, Mei-Agustus, Tahun XXVII.
- Pelras, Christian. 2006. The Bugis, Terj. Abdul Rahman Abu, dkk, Manusia Bugis, Cet. I; Jakarta: Nalar bekerjasama Forum Jakarta-Paris.
- Philipus, Adrian dan Nurul Aini. 1988. *Politik Internasional Kerangka Analitis*. Jakarta: Erlangga Press
- Prasetyo, Stanley Adi. 2010. "Adakah Media Untuk Keturunan Tionghoa?". Setelah Air Mata Kering (Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998), Kompas 2010.
- Rahardja T. 2005. *Menghargai Perbedaan Kultur: Mindfulness Dalam komunikasi antara etnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ricklefs, M.C. 1995. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soemardjan, Selo. 2011. *Pengawasan Sosial Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Obor.
- Setiono Benny G. 2005. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Elkasa Soyomukti Nurani.
- _____. 2002. Soekarno dan Cina. Yogyakarta: Garasi
- Suhandinata, Justian. 2009. *WNI Keturunan Cina dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Suryadinata, Leo. 1988. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta :Temprint
- _____. 1999. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta:LP3ES
- _____. 2002. *Negara dan Etnis Tionghoa*. Jakarta: LP3ES
- Tan, Mely G. 1979. *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia, Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Gramedia
- Wahid, Abdurahman. 1990. *Beri Jalan Tionghoa, Non Pribumi Di Mata Pribumi*. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.

- Wibowo I dan Thung Ju Lan. 2010. *Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca Peristiwa Mei 1998*. Jakarta: Kompas
- Wibowo I. 1999. *Retropaksi dan Rekontektualisasi Masalah Cina*. Jakarta: PT.Gramedia
- Widja, I. Gde. 2002. *Menuju Wajah Baru Pendidikan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Laper Pustaka Utama.
- Wirawan, Yerri. 2008. *Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar dari Abad ke-17 hingga ke-20*. Jakarta: Kepustakaan populer Gramedia.
- Yudohusodo, Siswono. 1985. *Warga Baru: Kasus Cina di Indonesia*. Jakarta:Lembaga Penelitian Yayasan padamu Negri.